

Katalog BPS : 1413.1707  
Nomor : 1707.1004

*Indeks*  
*Pembangunan Manusia*  
**KABUPATEN LEBONG**

*Human Development Index of Lebong Regency*

**2009**

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KABUPATEN LEBONG TAHUN 2009

**DATA**  
MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LEBONG**  
Kompleks Perkantoran Jalur Dua Tubei  
email: [bpslebong@gmail.com](mailto:bpslebong@gmail.com)



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN LEBONG**  
*BPS - Statistics of Lebong Regency*

---

# INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

## KABUPATEN LEBONG

### TAHUN 2009

#### ***HUMAN DEVELOPMENT INDEX (HDI) OF LEBONG REGENCY 2009***

Katalog BPS / <i>BPS Catalog</i>	: 1413.1707
Nomor Publikasi / <i>Publication Number</i>	: 1707.1004
Ukuran Buku / <i>Book Size</i>	: 21,57 cm x 27,94 cm
Jumlah Halaman / <i>Number of Pages</i>	: viii + 45

Naskah / *Manuscript* :

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS

*Division of Regional Accounts and Statistical Analysis BPS*

Gambar Kulit / *Cover Design* :

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS

*Division of Regional Accounts and Statistical Analysis BPS*

Diterbitkan Oleh / *Published by* :

BPS Kabupaten Lebong

*BPS – Statistic of Lebong Regency*

Boleh Dikutip Dengan Menyebut Sumbernya

*May be Cited With Reference to the Source*

---

## KATA PENGANTAR

Pembangunan manusia adalah suatu proses pembangunan yang bertujuan agar mampu mempunyai lebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan serta kehidupan yang layak, dan masing-masing dimensi direpresentasikan oleh indikator. Dimensi umur panjang dan sehat direpresentasikan oleh indikator angka harapan hidup, dimensi pengetahuan direpresentasikan oleh indikator angka melek huruf dan rata-rata lamanya sekolah, serta dimensi kehidupan yang layak direpresentasikan oleh indikator kemampuan daya beli. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi pembangunan manusia ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Penyajian angka IPM menurut daerah memungkinkan setiap provinsi dan kabupaten/kota mengetahui peta pembangunan manusia baik pencapaian, posisi maupun disparitas antar daerah. Dengan ini, maka diharapkan agar daerah dapat terpacu untuk berupaya meningkatkan kinerja pembangunan melalui peningkatan kapasitas dasar penduduk.

Semoga publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lebong Tahun 2009 ini bermanfaat bagi semua kalangan yang berkepentingan termasuk masyarakat pengguna sebagai bahan rujukan.

Tubei, Oktober 2010  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Lebong

**Novrizal, SE**  
NIP. 19661102 199212 1 001

## DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL .....	i
KETERANGAN .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	viii
BAB 1. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Maksud dan Tujuan.....	5
BAB 2. METODOLOGI .....	7
2.1. Metode Penghitungan.....	8
2.2. Komponen IPM .....	10
2.3. Klasifikasi/Pengelompokan IPM.....	16
2.4. Sumber Data IPM .....	17
BAB 3. GAMBARAN UMUM KABUPATEN LEBONG .....	18
3.1. Keadaan Geografis.....	19
3.2. Penduduk.....	20
3.3. Kesehatan.....	21
3.4. Pendidikan.....	25
3.5. Potensi Ekonomi .....	29

BAB 4. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN LEBONG .....	32
4.1. Indeks Harapan Hidup.....	34
4.2. Indeks Pendidikan.....	35
4.3. Indeks Daya Beli.....	37
4.4. Indeks Pembangunan Manusia.....	38
4.5. Perbandingan IPM Antar Kabupaten/Kota.....	40
BAB 5. PENUTUP .....	42
5.1. Kesimpulan.....	43
5.2. Implikasi Kebijakan .....	44

<http://lebongkab.bps.go.id>

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Nilai Maksimum, Nilai Minimum dan Range Pencapaian Indikator Komponen IPM.....	9
Tabel 2. Tahun Konversi/Skor dari Pendidikan Tinggi Yang Ditamatkan .....	13
Tabel 3. Daftar Paket Komoditi Yang Digunakan Dalam Penghitungan <i>Purchasing Power Parity (PPP)</i> .....	15
Tabel 4. Klasifikasi Komponen IPM.....	16
Tabel 5. Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum di Kabupaten Lebong Tahun 2008.....	24
Tabel 6. Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Dinding Terluas di Kabupaten Lebong Tahun 2008.....	25
Tabel 7. Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kabupaten Lebong Tahun 2008.....	25
Tabel 8. Banyaknya Guru Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Lebong Tahun 2009.....	27
Tabel 9. Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis di Kabupaten Lebong Tahun 2008 .....	28

Tabel 10. Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Ijazah Yang Dimiliki di Kabupaten Lebong Tahun 2008.....	28
Tabel 11. Angka dan Indeks Harapan Hidup Kabupaten Lebong Tahun 2008-2009.....	35
Tabel 12. Angka Melek Huruf dan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Lebong Tahun 2008-2009.....	35
Tabel 13. Indeks Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pendidikan di Kabupaten Lebong Tahun 2008-2009.....	36
Tabel 14. Indikator dan Indeks Daya Beli Kabupaten Lebong Tahun 2008-2009.....	37
Tabel 15. Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya di Kabupaten Lebong Tahun 2008-2009.....	39
Tabel 16. Angka IPM dan Peringkat IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2008-2009.....	41

## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Lebong .....	20
Gambar 2. Jumlah Puskesmas Menurut Jenisnya di Kabupaten Lebong Tahun 2009 .....	22
Gambar 3. Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Lebong Tahun 2009 .....	26
Gambar 4. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Kabupaten Lebong Tahun 2008-2009 .....	30

# PENDAHULUAN



<http://lebongkab.bps.go.id>

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya dapat diukur melalui berhasilnya pembangunan fisik, melainkan juga pencapaian pembangunan non fisik. Jika keberhasilan pembangunan fisik bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan perkapita, maka pembangunan non fisik lebih menekankan pada aspek pembangunan manusia. Dalam menghadapi era globalisasi yang tengah memasuki pasar bebas, sangat diperlukan sumber daya manusia yang mampu bersaing ketat di dalamnya. Untuk itu, pemerintah perlu lebih memfokuskan pada pembangunan yang terpusat pada manusianya sendiri.

Seiring dengan era reformasi pembangunan, tampak bahwa paradigma pembangunan di dunia telah bergeser. Pergeseran paradigma ini bertolak dari kenyataan bahwa pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan hasil produksi dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Jika dilihat dari perubahan konsep di dunia, pada awal dekade 70-an banyak pendapat mengemukakan bahwa pertumbuhan produksi merupakan syarat bagi kesejahteraan masyarakat, namun hasilnya belum memadai. Pada dekade itu juga ditekankan pada distribusi hasil-hasil pembangunan (*distribution-growth development*). Selanjutnya pada awal dekade 80-an muncul paradigma

pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need development*), dan akhir-akhir ini sejak tahun 90-an paradigma pembangunan terpusat pada aspek manusia (*human centered development*).

Dalam konteks tersebut, UNDP (*United Nations Development Programme*) menganggap bahwa pembangunan manusia dapat dilihat sebagai proses upaya agar penduduk memperoleh “perluasan pikiran” dan sekaligus sebagai taraf kehidupan yang dicapai dari upaya tersebut. Pada saat yang sama pembangunan manusia dapat dilihat juga sebagai pembangunan kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan dan keterampilan, sekaligus sebagai pemanfaatan kemampuan/keterampilan tersebut. Konsep pembangunan manusia ini lebih luas pengertiannya dibanding konsep pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan, kebutuhan dasar, kesejahteraan masyarakat, atau pembangunan sumber daya manusia.

Sebagaimana dinyatakan dalam *Human Development Report (HDR)* pertama yang dipublikasikan oleh UNDP, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki manusia. Di antara pilihan tersebut, pilihan terpenting adalah untuk berumur panjang, sehat, berilmu pengetahuan dan untuk memperoleh akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar hidup secara layak.

Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan berbagai aspek meliputi produksi, distribusi komoditas, peningkatan kemampuan manusia dan secara bersamaan mengakomodir berbagai isu di masyarakat seperti pertumbuhan

ekonomi, ketenagakerjaan, perdagangan, kebebasan berpolitik, serta isu gender ataupun nilai-nilai kultural. Menurut HDR, ada empat komponen penting dalam paradigma pembangunan manusia, yaitu produktifitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), kesinambungan (*sustainability*) dan pemberdayaan (*empowerment*). Dalam pelaksanaannya, untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan terhadap hasil pembangunan manusia diperlukan suatu ukuran tertentu. Ukuran atau indikator tersebut sifatnya haruslah angka tunggal (indikator komposit) yang dapat menggambarkan berbagai indikator tertentu.

Sejak tahun 1990, UNDP telah menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah. Indeks tersebut merupakan angka agregat yang dapat diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh (*shortfall*) suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimum 100. Pengukuran IPM difokuskan pada tiga dimensi yang dianggap esensial bagi kehidupan manusia yaitu usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent living standards*).

UNDP merekomendasikan bahwa tingkat keberhasilan pembangunan suatu negara secara minimal direfleksikan dengan tingkat pemenuhan tiga unsur, yaitu peluang berumur panjang dan sehat, berpengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta peluang untuk mendayagunakan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan produktif. Berdasarkan tiga unsur tersebut, maka diperoleh indikator-indikator berupa angka harapan hidup (*life expectancy at age 0*) yang mengukur

tingkat kesehatan masyarakat, angka melek huruf dewasa (*adult literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) untuk mengukur tingkat pendidikan dan keterampilan, serta *purchasing power parity* yang merupakan ukuran pendapatan yang disesuaikan dengan paritas daya beli untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. IPM itu sendiri merupakan indeks komposit dari ketiga indikator di atas.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

Berbagai program pembangunan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk harus selalu dievaluasi menggunakan berbagai indikator. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu kajian analisis kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas penduduk. Oleh karena itu, maksud dan tujuan pengukuran IPM Kabupaten Lebong adalah sebagai berikut:

1. Mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
2. Sebagai salah satu alat ukur kinerja suatu daerah, terutama dalam hal evaluasi proses pembangunan sumber daya manusia.
3. Sebagai alat untuk mempersiapkan kemajuan pembangunan antar kabupaten di suatu wilayah tertentu.
4. Sebagai input dan output terhadap kebijakan dan pelaksanaan pembangunan yang telah, sedang dan akan dilakukan.

5. Sebagai salah satu indikator dalam penyusunan Dana Alokasi Umum (DAU).
6. Sebagai bahan acuan bagi para peneliti, cendekiawan, pelaku ekonomi dan konsumen data dalam pelaksanaan riset maupun sumber pustaka.
7. Sebagai bahan kajian yang bersifat analisis terhadap kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas penduduk.
8. Tersedianya berbagai indikator pembangunan manusia yang berguna dalam pelaksanaan evaluasi dan perencanaan pembangunan yang berjarak dengan indikator pertumbuhan ekonomi daerah.
9. Sebagai acuan penajaman prioritas pembangunan. Artinya, perubahan pola penganggaran pembangunan yang selama ini menggunakan aturan kesepakatan dari pihak penentu ke pola pembangunan yang lebih memihak orang banyak. Dengan demikian, kegiatan pembangunan lebih diarahkan pada aspek efisiensi dan efektivitas anggaran.

---

# METODOLOGI

2

<http://lebongkab.bps.go.id>

## BAB 2 METODOLOGI

### 2.1. Metode Penghitungan

Metodologi yang digunakan dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara umum sama seperti yang dilakukan oleh *United Nations Development Programme (UNDP)* dalam menyusun *Human Development Index (HDI)* tahun 1994 yang juga telah diterapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan dan Indeks Daya Beli Penduduk (standar hidup layak). Komponen-komponen penyusun indeks-indeks tersebut meliputi angka harapan hidup ( $e_0$ ), angka melek huruf ( $Lit$ ) dan rata-rata lama sekolah ( $MYS$ ) serta kemampuan daya beli (*purchasing power parity/PPP*) yang telah disesuaikan.

IPM diperoleh melalui dua tahapan sebagai berikut:

1. Tahap pertama adalah menghitung indeks masing-masing komponen pembentuk IPM, meliputi Indeks Harapan Hidup ( $e_0$ ), Indeks Pendidikan dan Indeks Daya Beli. Adapun rumus penghitungan indeks masing-masing komponen IPM adalah:

$$\text{Indeks } X_i = \left( \frac{X_i - X_{min}}{X_{max} - X_{min}} \right) \times 100$$

Keterangan:

$X_i$  = Indikator Komponen IPM ke- $i$  ( $i = 1,2,3$ )

$X_{min}$  = Nilai Minimum dari  $X_i$

$X_{max}$  = Nilai Maksimum dari  $X_i$

Besarnya nilai minimum dan maksimum adalah berdasarkan standar dari UNDP. Dari persamaan di atas akan menghasilkan angka  $0 < Indeks (X_i) < 1$  dan untuk mempermudah membaca nilai indeks, maka persamaan tersebut dikalikan dengan 100 sehingga menjadi  $0 < Indeks (X_i) < 100$ .

Tabel 1. Nilai Maksimum, Nilai Minimum dan Range Pencapaian Indikator Komponen IPM

Indikator	Nilai Maksimum	Nilai Minimum	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Harapan Hidup	85	25	Standar UNDP
Angka Melek Huruf	100	0	Standar UNDP
Rata-Rata Lama Sekolah	15	0	UNDP (Menggunakan <i>combined gross enrolment ratio</i> )
Daya Beli	732.720 <sup>a)</sup>	300.000 (1996) 360.000 <sup>b)</sup> (1999)	UNDP (Menggunakan PDB riil perkapita yang telah disesuaikan)

Keterangan:

a) Perkiraan maksimum pada akhir PJP II tahun 2018

b) Penyesuaian garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan baru

2. Tahap kedua adalah penghitungan IPM dengan merata-ratakan jumlah masing-masing indeks komponen IPM. Adapun rumus yang digunakan adalah:

$$IPM = \frac{1}{3}(X_1 + X_2 + X_3)$$

Keterangan:

$X_1$  = Indeks Harapan Hidup

$X_2$  = Indeks Pendidikan yaitu  $\frac{2}{3}$  (Indeks Melek Huruf) +  $\frac{1}{3}$  (Indeks Rata-Rata Lama Sekolah)

$X_3$  = Indeks Daya Beli yang disesuaikan

## 2.2. Komponen IPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator gabungan dari beberapa indikator, yaitu indikator kesehatan (Indeks Harapan Hidup), indikator pendidikan (Indeks Melek Huruf dan Rata-Rata Lama Sekolah) dan indikator ekonomi (tingkat daya beli penduduk/*purchasing power parity*). Ketiga indikator tersebut dianggap dapat mengukur tingkat kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan di suatu wilayah.

### a. Angka Harapan Hidup 0 Tahun dan Indeks Harapan Hidup

Untuk mengukur usia hidup, *United Nations Development Programme* (UNDP) menggunakan indikator angka harapan hidup waktu lahir (*life-expectancy at birth*) sebagai salah satu komponen penghitungan IPM. Angka harapan hidup dapat menggambarkan derajat kesehatan masyarakat suatu daerah. Semakin baik kesehatan seseorang maka kecenderungan hidup lebih

lama akan semakin tinggi dan semakin buruk kesehatan maka kematian akan semakin dekat.

Untuk menghitung angka harapan hidup digunakan metode tidak langsung dengan dua macam data dasar yaitu rata-rata anak yang dilahirkan hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Prosedur penghitungan angka harapan hidup sejak lahir ( $AHH_0$  atau  $e_0$ ) dilakukan dengan menggunakan *software Mortpack* (metode *trussel* dengan model *west*).

Setelah mendapatkan angka harapan hidup sejak lahir, selanjutnya dihitung Indeks Harapan Hidup (Indeks  $AHH_0$ ) yaitu dengan membandingkan angka tersebut dengan angka yang sudah distandarkan (dalam hal ini UNDP atau BPS telah menetapkan nilai minimum dan nilai maksimum untuk angka harapan hidup yaitu masing-masing 25 tahun dan 85 tahun). Formula Indeks  $AHH_0$  adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks } AHH_0 = \frac{AHH_{0,t} - AHH_{0,\min}}{AHH_{0,\max} - AHH_{0,\min}} \times 100$$

Keterangan:

$AHH_{0,t}$  = Angka Harapan Hidup Tahun ke- $t$

$AHH_{0,\min}$  = Angka Harapan Hidup Minimum (25)

$AHH_{0,\max}$  = Angka Harapan Hidup Maksimum (85)

## **b. Angka Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah dan Indeks Pendidikan**

### **b.1. Angka Melek Huruf (Lit/AMH)**

Tingkat perkembangan pendidikan suatu daerah dapat dievaluasi dengan melihat besarnya Angka Melek Huruf (AMH). AMH adalah proporsi

penduduk berumur di atas 15 tahun yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya terhadap jumlah penduduk 15 tahun ke atas.

Pembatasan kelompok umur 15 tahun ke atas didasarkan pada proporsi penduduk yang usianya dianggap telah cukup untuk belajar membaca dan menulis Bahasa Indonesia di sekolah.

### **b.2. Rata-Rata Lama Sekolah (*Mean Years of Schooling/MYS*)**

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka rata-rata lama sekolah dihitung dengan mengolah dua variabel secara simultan, yaitu tingkat/kelas yang sedang/pernah diduduki dan jenjang pendidikan yang ditamatkan. Penghitungan rata-rata lama sekolah dilakukan secara bertahap. Tahap pertama menghitung lama sekolah untuk masing-masing individu menggunakan pola hubungan antar variabel. Tahap selanjutnya menghitung rata-rata lama sekolah. Adapun formula yang digunakan adalah:

$$MYS = \frac{\sum_i f_i * j_i}{\sum_i f_i}$$

Keterangan:

*MYS* = Rata-rata lama sekolah

*f<sub>i</sub>* = Frekuensi penduduk usia 15 tahun ke atas untuk jenjang pendidikan *i*

*j<sub>i</sub>* = Lama sekolah untuk masing-masing jenjang pendidikan yang ditamatkan atau tingkat pendidikan yang pernah diduduki

*i* = Jenjang pendidikan

Indeks Rata-Rata Lama Sekolah diperoleh dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Indeks MYS} = \frac{MYS_t - MYS_{min}}{MYS_{max} - MYS_{min}} \times 100$$

Adapun jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan skor yang digunakan untuk menghitung rata-rata lama sekolah dapat dilihat dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Tahun Konversi/Skor dari Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Skor/Tahun Konversi
(1)	(2)
Tidak pernah sekolah	0
Sekolah Dasar	6
SLTP	9
SLTA	12
Diploma I	13
Diploma II	14
Diploma III	15
Diploma IV/Sarjana	16
Magister (S2)	19
Doctor (S3)	21

### b.3. Indeks Pendidikan (Indeks AMH + Indeks MYS)

Untuk memperoleh Indeks Pendidikan, Indeks Melek Huruf dan Indeks Rata-Rata Lama Sekolah dijumlahkan dengan perbandingan 2:1 sehingga diperoleh formula Indeks Pendidikan (IP) sebagai berikut:

$$\text{Indeks Pendidikan (IP)} = \frac{2}{3} \text{Indeks AMH} + \frac{1}{3} \text{Indeks MYS}$$

### c. Tingkat Daya Beli (*Purchasing Power Parity/PPP*)

Untuk mengukur standar hidup layak, dalam penghitungan IPM digunakan konsumsi perkapita riil yang telah disesuaikan (*Purchasing Power Parity/PPP*). PPP dihitung berdasarkan pengeluaran riil perkapita setelah disesuaikan dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan penurunan utilitas marginal yang dihitung dengan formula *Atkinson*. Adapun tahapan penghitungan konsumsi perkapita riil atau tingkat daya beli masyarakat yang disesuaikan adalah sebagai berikut:

1. Menghitung pengeluaran konsumsi perkapita dari SUSENAS Kor (A).
2. Menyesuaikan nilai A dengan data SUSENAS Modul (B). Penyesuaian ini dilakukan dikarenakan data konsumsi SUSENAS Kor cenderung tidak sama.
3. Membandingkan pola konsumsi SUSENAS Modul dengan pola konsumsi dari Survei Biaya Hidup untuk mencari IHK yang sesuai.
4. Mendeflasikan nilai B dengan IHK yang sesuai (C).
5. Menghitung daya beli penduduk. Data dasar yang digunakan adalah data harga dan quantum dari suatu kelompok komoditi yang terdiri dari nilai 27 komoditi. Dengan penghitungan PPP/unit sebagai berikut:

$$PPP(\text{unit}) = \frac{\sum_j E_{i,j}}{\sum_j P_{9,j} * Q_{i,j}}$$

Keterangan:

$E_{i,j}$  = Total pengeluaran komoditi  $j$  di kabupaten  $i$

$P_{9,j}$  = Harga komoditi  $j$  di DKI Jakarta

$Q_{i,j}$  = Volume komoditi  $j$  (unit) yang dikonsumsi di kabupaten  $i$

DKI Jakarta dijadikan sebagai patokan/standar supaya IPM (khususnya PPP) kabupaten/kota dapat diperbandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di seluruh Indonesia.

Tabel 3. Daftar Paket Komoditi yang Digunakan dalam Penghitungan Purchasing Power Parity (PPP)

Komoditi	Unit	Proporsi dari Total Konsumsi
(1)	(2)	(3)
1 Beras lokal	Kg	7,25
2 Tepung terigu	Kg	0,10
3 Singkong	Kg	0,22
4 Tuna/Cakalang	Kg	0,50
5 Teri	Ons	0,32
6 Daging sapi	Kg	0,78
7 Ayam	Kg	0,65
8 Telur	Butir	1,48
9 Susu kental manis	397 gram	0,48
10 Bayam	Kg	0,30
11 Kacang panjang	Kg	0,32
12 Kacang tanah	Kg	0,22
13 Tempe	Kg	0,79
14 Jeruk	Kg	0,39
15 Pepaya	Kg	0,18
16 Kelapa	Buah	0,56
17 Gula	Kg	1,61
18 Kopi	Kg	0,60
19 Garam	Kg	0,15
20 Merica	80 gram	0,13
21 Mie instan	10	0,79
22 Rokok kretek	batang	2,86
23 Listrik	KwH	2,06
24 Air minum	m <sup>3</sup>	0,46
25 Bensin	Liter	01,02
26 Minyak tanah	Liter	01,74
27 Sewa rumah	m <sup>3</sup>	11,56

6. Membagi nilai C dengan PPP/unit (D).
7. Menyesuaikan nilai D dengan formula *Atkinson* sebagai upaya untuk memperkirakan nilai marginal dari D (E).

### 2.3. Klasifikasi/Pengelompokan IPM

Menurut *United Nations Development Programme (UNDP)*, besaran angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diklasifikasikan menjadi empat kategori sbb:

1. IPM < 50, artinya terbelakang (kesejahteraan rendah),
2. IPM antara 50 – 65, artinya kesejahteraan menengah ke bawah,
3. IPM antara 66 – 70, artinya kesejahteraan menengah ke atas,
4. IPM di atas 70 berarti kesejahteraan tinggi.

Tabel 4. Klasifikasi Komponen IPM

Klasifikasi	Indeks Pendidikan	Indeks Harapan Hidup	Indeks Daya Beli
(1)	(2)	(3)	(4)
Tinggi	78,10 - 86,98	69,70 - 74,40	52,37 - 53,77
Sedang	69,21 - 78,09	64,99 - 69,69	50,96 - 52,36
Rendah	60,32 - 69,20	60,28 - 64,98	49,55 - 50,95

Selain itu, reduksi *shortfall* dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur keberhasilan dan kemajuan dipandang dari jarak antara yang dicapai terhadap kondisi ideal (IPM=100). Nilai reduksi *shortfall* yang lebih besar menandakan

peningkatan IPM yang lebih cepat. Pengukuran ini didasarkan asumsi laju perubahan tidak bersifat linier tetapi laju perubahan cenderung melambat pada tingkat IPM yang lebih tinggi. Adapun formula penghitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Reduksi Sortfall} = \frac{IPM P_n - IPM P_{n-1}}{IPM_{Referensi} - IPM P_{n-1}} \times 100$$

Keterangan:

$IPM P_n$  = Indeks Pembangunan Manusia tahun ke- $n$

$IPM P_{n-1}$  = Indeks Pembangunan Manusia tahun ke- $n-1$

$IPM_{Referensi}$  = Indeks Pembangunan Manusia Referensi (100)

## 2.4. Sumber Data IPM

Sumber data dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berasal dari hasil survei yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu *Indepth Interview*, Pendataan Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Sensus Penduduk dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). SUSENAS dilaksanakan setiap tahun menggunakan dua jenis kuesioner yaitu kuesioner kor (pertanyaan pokok) dan kuesioner modul. Kuesioner modul terdiri dari tiga jenis modul yaitu modul konsumsi dan pendapatan, modul sosial budaya, perjalanan, persepsi kesejahteraan dan kriminalitas, serta modul kesehatan, pendidikan dan perumahan. Ketiga modul tersebut dilaksanakan bergilir setiap tahunnya. Selain itu juga digunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk mendeflasikan harga implisit dari 27 komoditi pada SUSENAS Panel.

---

GAMBARAN UMUM  
KABUPATEN LEBONG

3

<http://lebongkab.go.id>

## BAB 3

# GAMBARAN UMUM KABUPATEN LEBONG

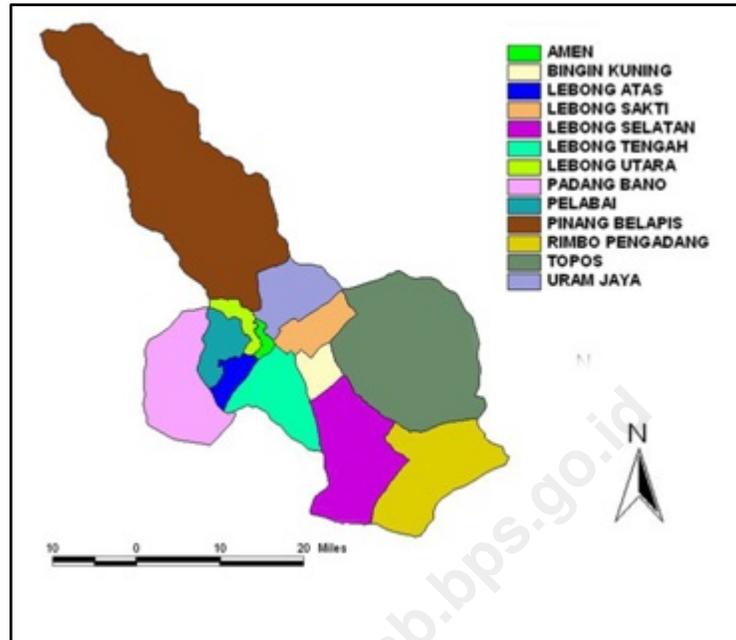
### 3.1. Keadaan Geografis

Awal mula terbentuknya Kabupaten Lebong adalah sejak tahun 2003. Wilayah Kabupaten Lebong sendiri pada awalnya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Kabupaten Lebong terletak di sebelah barat pegunungan barisan dan berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan di sebelah timur, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Surolangun Provinsi Jambi, sebelah selatan Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara di sebelah baratnya.

Luas wilayah Kabupaten Lebong adalah 2.427,31\*) km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 13 kecamatan yaitu Kecamatan Topos, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kecamatan Lebong Selatan, Kecamatan Bingin Kuning, Kecamatan Lebong Sakti, Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Uram Jaya, Kecamatan Amen, Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Pinang Belapis, Kecamatan Lebong Atas, Kecamatan Pelabai dan Kecamatan Padang Bano. Kabupaten Lebong beribukota di Tubei yang terletak di Kecamatan Lebong Atas dan pusat perekonomiannya terletak di Kecamatan Lebong Utara. Wilayahnya terbagi menjadi 98 desa dan 12 kelurahan. Berdasarkan topografinya, hampir separuh wilayah Kabupaten Lebong terletak di dataran tinggi, yaitu pada ketinggian di atas 1000 meter.

\*) Sumber: Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lebong

Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Lebong



### 3.2. Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Lebong (angka sementara) berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk Mei 2010 setelah dikurangi jumlah penduduk daerah sengketa antara Desa Padang Bano dengan Desa Renah Jaya (Kabupaten Bengkulu Utara) adalah 97.091 orang. Jumlah penduduk laki-laki adalah sebanyak 49.693 orang dan penduduk perempuan sebanyak 47.389 orang dengan rasio jenis kelamin sebesar 104,84.

Pada tahun 2009, jumlah pencari kerja baru yang terdaftar di Kabupaten Lebong adalah sebanyak 1.050 orang dengan pendidikan SLTA 34 orang, sarjana muda sebanyak 371 orang dan sarjana sebanyak 645 orang. Berdasarkan klasifikasi lapangan usaha yang diminati oleh para pencari kerja, mayoritas pencari

kerja mendaftarkan pada sektor jasa-jasa, yaitu sebanyak 538 orang atau 51,24 persen, sedangkan sektor pemerintahan dan pertahanan sebanyak 291 orang atau 27,71 persen, sektor industri pengolahan sebanyak 46 orang atau 4,38 persen dan sisanya sebanyak 16,67 persen terdaftar di lima sektor ekonomi lainnya (*Lebong Dalam Angka 2009*).

### **3.3. Kesehatan**

Kesehatan merupakan indikator penting karena termasuk salah satu ukuran yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk. Pentingnya kesehatan dan gizi tercermin dari Undang-Undang Kesehatan No.23 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam rangka tercapainya hidup sehat. Selanjutnya, tujuan utama di bidang kesehatan antara lain adalah menurunnya angka kesakitan dan meningkatnya status gizi penduduk. Peningkatan taraf kesehatan penduduk akan berdampak pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan kualitas SDM akan meningkatkan produktivitas penduduk yang bekerja.

#### **a. Status Kesehatan**

Berdasarkan hasil SUSENAS 2008, persentase penduduk Kabupaten Lebong yang mempunyai keluhan kesehatan dan menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari adalah sebesar 66,88 persen. Bila dibandingkan dengan

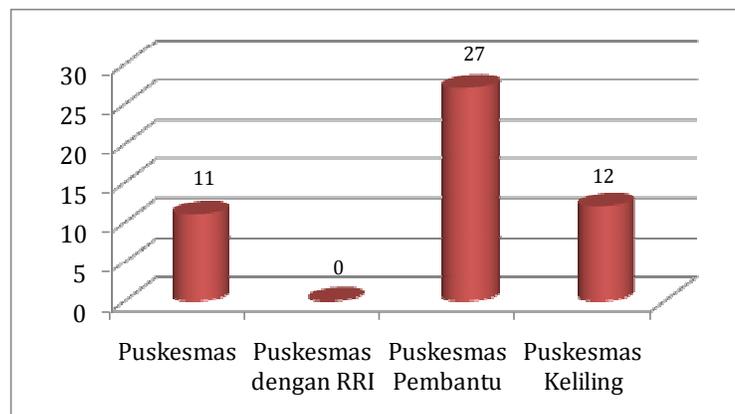
rata-rata Provinsi Bengkulu yang sebesar 63,06 persen, artinya tingkat keluhan kesehatan di Kabupaten Lebong relatif lebih tinggi.

#### b. Akses Pada Fasilitas Kesehatan

Derajat kesehatan penduduk Kabupaten Lebong mengalami peningkatan yang ditandai dengan meningkatnya angka harapan hidup. Angka harapan hidup Kabupaten Lebong tahun 2009 sebesar 66,26 tahun meningkat dibandingkan tahun 2008 yang sebesar 65,87 tahun. Meningkatnya angka harapan hidup salah satunya disebabkan oleh semakin baiknya kualitas kesehatan masyarakat. Perbaikan kualitas kesehatan dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat itu sendiri maupun peran pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana penunjang kesehatan

Pada tahun 2009, di Kabupaten Lebong terdapat 11 buah puskesmas, 27 buah puskesmas pembantu dan 12 buah puskesmas keliling yang tersebar di 13 kecamatan.

Gambar 2. Jumlah Puskesmas Menurut Jenisnya di Kabupaten Lebong Tahun 2009



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan akses penduduk terhadap fasilitas kesehatan adalah persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan yang pernah berobat jalan ataupun mengobati sendiri. Berdasarkan hasil SUSENAS 2008, persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan mengobati sendiri dalam satu bulan terakhir di Kabupaten Lebong adalah sebesar 84,05 persen. Sementara itu, persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan pernah berobat jalan dalam satu bulan terakhir adalah 31,28 persen.

Besarnya persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan melakukan pengobatan sendiri mungkin disebabkan karena ketidakmampuan secara ekonomi untuk membiayai jasa kesehatan yang memang tidak murah. Hal lain yang mendorong penduduk melakukan pengobatan sendiri mungkin karena penyakitnya dianggap tidak tergolong berat sehingga cukup dengan membeli obat yang tersedia di warung atau toko obat.

### **c. Fasilitas Perumahan dan Air Minum**

Selain sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah, kondisi tempat tinggal juga menjadi salah satu indikator peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Berdasarkan hasil SUSENAS 2008, persentase rumah tangga di Kabupaten Lebong yang menggunakan fasilitas listrik PLN adalah sebesar 80,98 persen, listrik non PLN sebesar 2,29 persen dan sisanya menggunakan petromaks, senter dan lainnya.

Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas air minum sendiri di

Kabupaten Lebong adalah sebesar 60,53 persen, 29,89 persen menggunakan fasilitas air minum secara bersamaan serta sisanya umum dan tidak memiliki fasilitas air minum. Berdasarkan sumber air minum, 24,94 persen rumah tangga menggunakan sumber air minum dari ledeng, 23,63 persen berasal dari mata air tak terlindung, 23,03 persen dari sumur tak terlindung dan sisanya berasal dari sumber air minum lainnya.

Tabel 5. Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum di Kabupaten Lebong Tahun 2008

Sumber Air Minum	Persentase
(1)	(2)
Ledeng	24.94
Pompa	1.50
Sumur Terlindung	11.01
Sumur Tak Terlindung	23.03
Mata Air Terlindung	13.92
Mata Air Tak Terlindung	23.63
Air Sungai	1.81
Air Kemasan	0.15

Sumber : SUSENAS 2008

Berdasarkan jenis lantai terluas, mayoritas rumah penduduk Kabupaten Lebong memiliki lantai bukan tanah yaitu sebesar 97,20 persen dan sisanya sebesar 2,80 persen berlantai tanah. Adapun untuk persentase rumah tangga berdasarkan jenis dinding terluas dan tempat pembuangan akhir tinja dapat dilihat pada Tabel 6 dan Tabel 7 berikut.

Tabel 6. Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Dinding Terluas di Kabupaten Lebong Tahun 2008

Jenis Dinding	Persentase
(1)	(2)
Tembok	36.01
Kayu	46.30
Bambu	16.47
Lainnya	1.22

Sumber : SUSENAS 2008

Tabel 7. Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kabupaten Lebong Tahun 2008

Tempat Pembuangan Akhir Tinja	Persentase
(1)	(2)
Tangki	24.94
Kolam/Sawah	1.50
Sungai/Danau/Laut	11.01
Lobang Tanah	23.03
Pantai/Kebun/Tanah Terbuka	13.92
Lainnya	23.63

Sumber : SUSENAS 2008

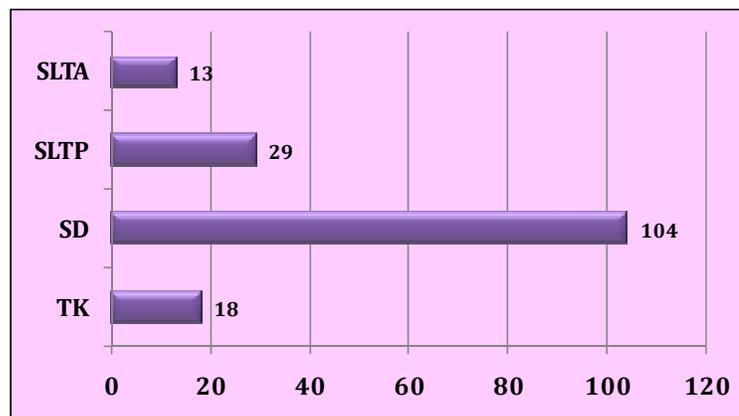
### 3.4. Pendidikan

Keunggulan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor mendasar kemajuan suatu bangsa dan tidak semata-mata tergantung pada keunggulan sumber daya alamnya. SDM yang bermutu dalam pengertian teknis, kemampuan, keahlian, keterampilan serta nilai-nilai moderen lainnya tetap diperlukan dan akan menjadi prasyarat mutlak untuk dapat mencapai keunggulan bagi suatu bangsa.

Pergeseran struktur masyarakat juga memiliki dampak mendasar dan berimplikasi terhadap terjadinya transisi kualifikasi SDM yang dibutuhkan. Pergeseran struktur masyarakat dari struktur tradisional ke struktur industri ditandai dari berkurangnya jenis pekerjaan pada sektor pertanian dan bertambahnya jenis pekerjaan pada sektor industri. Ke depannya, jenis pekerjaan tradisional yang mengandalkan keterampilan motoris akan tergantikan oleh jenis pekerjaan yang berlandaskan pada otomatisasi dan pengolahan informasi. Oleh karena itu, upaya memperbaiki profil pendidikan sudah merupakan suatu gejala universal. Pendidikan adalah suatu bentuk investasi yang produktif dan dipandang sebagai sarana untuk memasuki lingkungan kerja yang bersifat moderen.

Untuk melihat sejauh mana pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Lebong sudah mencapai sasaran, dapat ditunjukkan melalui beberapa indikator, di antaranya adalah ketersediaan sekolah, tenaga pengajar, kemampuan baca tulis, serta jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Gambar 3. Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Lebong Tahun 2009



Sumber : Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong

Berdasarkan Gambar 3 di atas terlihat bahwa jumlah sekolah menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Lebong tahun 2009 adalah 18 buah TK, 104 buah SD, 29 buah SLTP dan 13 buah SLTA baik swasta maupun negeri. Sebagian besar sekolah-sekolah tersebut terletak di Kecamatan Lebong Utara dan Kecamatan Lebong Selatan.

Selain melihat jumlah sekolah, ketersediaan tenaga pengajar juga harus diperhatikan karena kualitas siswa berhubungan positif dengan kualitas dan kuantitas guru. Penyebaran tenaga guru yang merata baik di daerah pedesaan maupun perkotaan juga akan mampu mengurangi kesenjangan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan. Tabel 8 berikut menunjukkan bahwa pada tahun 2009 jumlah guru di Kabupaten Lebong mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 8. Banyaknya Guru Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Lebong Tahun 2009

Tingkat Pendidikan	Tahun	
	2008	2009
(1)	(2)	(3)
TK	75	75
SD	730	898
SLTP	311	375
SLTA	211	306

Sumber : Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong

Kemampuan membaca dan menulis merupakan keterampilan minimal yang dibutuhkan penduduk untuk dapat menuju hidup yang lebih baik.

Kemampuan membaca dan menulis tercermin dari persentase penduduk 10 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis huruf latin.

Tabel 9. Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis di Kabupaten Lebong Tahun 2008

Kemampuan Membaca dan Menulis	Persentase
(1)	(2)
Huruf Latin	95.51
Huruf Arab	23.78
Huruf Lainnya	0.51

Sumber : SUSENAS 2008

Dari Tabel 9 di atas terlihat bahwa persentase penduduk 10 tahun ke atas di Kabupaten Lebong yang bisa membaca dan menulis huruf latin adalah sebesar 95,51 persen, huruf arab sebesar 23,78 persen dan huruf lainnya 0,51 persen.

Tabel 10. Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Ijazah Yang Dimiliki di Kabupaten Lebong Tahun 2008

Ijazah Yang Dimiliki	Persentase
(1)	(2)
Tidak Punya Ijazah	28.93
SD/Sederajat	29.92
SMP/Sederajat	19.21
SMU/Sederajat	16.98
DI,DII,DIII Akademi	2.61
Universitas/S2/S3	2.35

Sumber : SUSENAS 2008

Tingkat pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu indikator dampak yang menggambarkan tingkat pendidikan yang dicapai (ditamatkan)

penduduk 10 tahun ke atas yang pernah sekolah. Berdasarkan Tabel 10 di atas dapat dilihat bahwa pendidikan yang ditamatkan penduduk Kabupaten Lebong pada tahun 2008 sebagian besar masih tamat SD, sementara jenjang pendidikan yang semakin tinggi mempunyai persentase semakin kecil. Persentase penduduk yang berpendidikan tamat SMU – S3 sebanyak 21,94 persen dan penduduk yang tidak berijazah sebanyak 28,93 persen. Di sisi lain, penduduk usia 10 tahun ke atas yang memiliki ijazah lebih tinggi dari SD atau menyelesaikan wajib belajar 9 tahun hanya sebesar 41,15 persen.

### **3.5. Potensi Ekonomi**

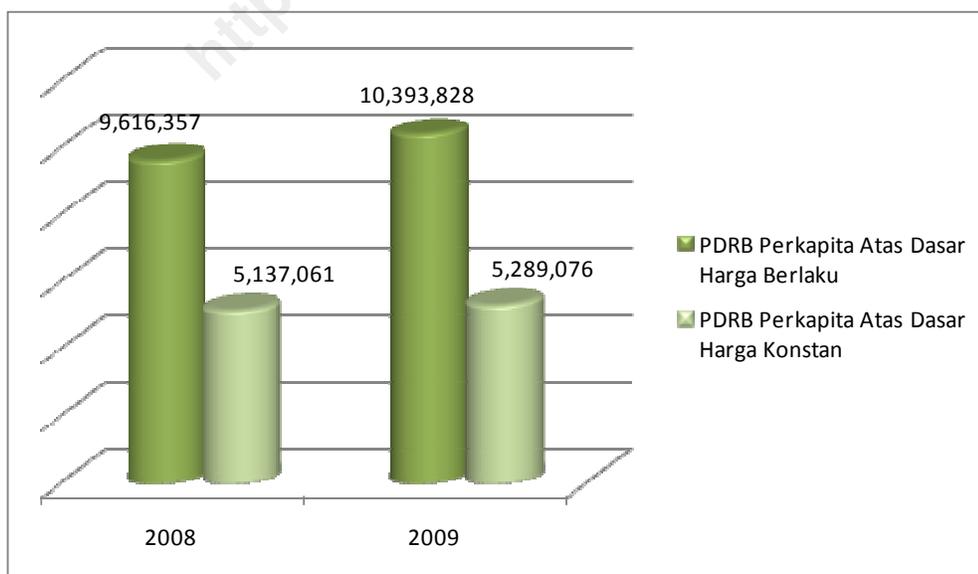
Pada tahun 2009 perekonomian Kabupaten Lebong mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lebong atas dasar harga berlaku tahun 2009 sebesar 962.250 juta rupiah yang mengalami peningkatan sebesar 9,79 persen dibandingkan PDRB tahun sebelumnya yang sebesar 876.454 juta rupiah. Selain itu, pada tahun 2009 Kabupaten Lebong juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif yaitu sebesar 4,58 persen. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2009 sedikit melambat 0,38 persen.

PDRB Kabupaten Lebong tahun 2009 atas dasar harga berlaku masih didominasi oleh sektor pertanian. Sektor pertanian memberikan kontribusi sebanyak 77,94 persen dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lebong tahun 2009. Sektor-sektor lain yang memberikan kontribusi cukup besar antara lain sektor

jasa-jasa sebesar 8,32 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 5,11 persen, dan sisanya tersebar di berbagai sektor ekonomi lainnya.

Pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi di Kabupaten Lebong tahun 2009 juga mengalami pertumbuhan yang positif. Sektor yang paling besar mengalami pertumbuhan adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang mengalami pertumbuhan sebesar 7,68 persen. Hal ini disebabkan karena subsektor sewa bangunan mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu sebesar 9,00 persen. Selain itu, pada tahun 2009 sektor bangunan/konstruksi juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu sebesar 6,60 persen. Angka ini relatif lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya karena pada tahun 2008 sektor bangunan/konstruksi mengalami pertumbuhan sebesar 10,68 persen.

Gambar 4. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Kabupaten Lebong Tahun 2008-2009



Bila dilihat dari nilai PDRB perkapita atas dasar harga berlaku di Kabupaten Lebong, secara umum tingkat pendapatan penduduk Kabupaten Lebong tahun 2009 mengalami peningkatan dibanding tahun 2008. Pada tahun 2008 PDRB perkapita penduduk Kabupaten Lebong sebesar 9,616 juta rupiah, sedangkan pada tahun 2009 terjadi peningkatan sebesar 8,08 persen menjadi 10,394 juta rupiah.

Bila ditinjau dari harga konstan tahun 2000, maka PDRB perkapita penduduk Kabupaten Lebong tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 2,96 persen dibanding tahun sebelumnya, yaitu dari 5,137 juta rupiah di tahun 2008 menjadi 5,289 juta rupiah di tahun 2009.

---

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA  
(IPM)  
KABUPATEN LEBONG

<http://lebongkab.bps.go.id>

4

## BAB 4 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KABUPATEN LEBONG

Pembangunan nasional Indonesia menempatkan manusia sebagai titik sentral sehingga mempunyai ciri dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam kerangka ini maka pembangunan ditujukan untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam semua proses dan kegiatan pembangunan. Untuk itu, pemerintah melakukan upaya meningkatkan kualitas penduduk sebagai suatu sumber daya.

*United Nations Development Programme (UNDP)* melakukan pengukuran kinerja pembangunan manusia melalui suatu ukuran komposit yang diberi nama Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks tersebut memuat tiga aspek, yaitu kesehatan, pendidikan dan keterampilan, serta mempunyai pendapatan yang memungkinkan untuk hidup layak. Oleh karena itu, dalam perspektif pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, IPM tidak memasukkan aspek pembangunan moral dan penanaman budi luhur bangsa ke dalam sistem nilai yang merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya alasan teknis yaitu sulit mengukur aspek tersebut dan formula penghitungan menjadi tidak sederhana. Namun demikian, dalam memberikan pengukuran tunggal dan sederhana dari upaya pembangunan, penggunaan indeks ini cukup memadai.

IPM merupakan indikator gabungan dari beberapa indikator yaitu

indikator kesehatan, indikator pendidikan dan indikator ekonomi. Indikator kesehatan tercermin dalam Indeks Harapan Hidup, indikator pendidikan tercermin dalam Indeks Pendidikan dan indikator ekonomi tercermin dalam Indeks Daya Beli. Ketiga indikator dasar tersebut dianggap dapat mengukur tingkat kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah.

#### **4.1. Indeks Harapan Hidup**

Perbandingan antar indikator komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan tinjauan parsial, artinya tingkat pembangunan baru diukur dari satu komponen. Pada tahun 2009 angka harapan hidup sejak lahir di Kabupaten Lebong adalah sebesar 66,26 tahun dengan Indeks Harapan Hidup ( $AHH_0$ ) sebesar 68,76. Hal ini berarti rata-rata umur penduduk di Kabupaten Lebong sampai dengan meninggal adalah 66,26 tahun. Angka ini lebih rendah daripada rata-rata usia hidup penduduk Provinsi Bengkulu yang sebesar 69,65 tahun. Namun demikian, angka harapan hidup penduduk Kabupaten Lebong pada tahun 2009 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Lebong telah memberi dampak positif pada perbaikan umur hipotesis yang semakin panjang.

Faktor lain yang memberikan sumbangan positif dalam meningkatnya angka harapan hidup adalah kesadaran masyarakat dalam membudayakan pola hidup sehat. Pergeseran nilai budaya tradisional menuju hidup sehat yang lebih moderen akan menentukan kemampuan mental dan fisik penduduk.

Tabel 11. Angka dan Indeks Harapan Hidup Kabupaten Lebong  
Tahun 2008-2009

Provinsi/Kabupaten	Angka Harapan Hidup ( $e_0$ )		Indeks Harapan Hidup	
	2008	2009	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lebong	65.87	66.26	68.12	68.76
<b>Bengkulu</b>	<b>69.40</b>	<b>69.65</b>	<b>74.00</b>	<b>74.42</b>

Jika dilihat dari klasifikasi Indeks Harapan Hidup yang dicapai, maka Kabupaten Lebong pada dua tahun terakhir ini (2008 dan 2009) berada pada kategori sedang dan Provinsi Bengkulu termasuk kategori tinggi.

## 4.2. Indeks Pendidikan

Pada Tabel 12 di bawah terlihat bahwa selama kurun waktu 2008-2009 Angka Melek Huruf (*Lit*) di Kabupaten Lebong mengalami peningkatan yang sangat sedikit, yaitu dari 95,19 persen menjadi 95,20 persen. Adalah suatu kemajuan yang berarti jika terjadi peningkatan *Lit* setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan sebagai salah satu kunci dari pembangunan manusia telah memberi hasil yang memuaskan.

Tabel 12. Angka Melek Huruf dan Rata-Rata Lama Sekolah  
di Kabupaten Lebong Tahun 2008-2009

Provinsi/Kabupaten	Angka Melek Huruf (%)		Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	
	2008	2009	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lebong	95.19	95.20	7.47	7.78
<b>Bengkulu</b>	<b>94.87</b>	<b>94.90</b>	<b>8.00</b>	<b>8.23</b>

Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) penduduk Kabupaten Lebong tahun 2008 dan 2009 menunjukkan peningkatan yang konstan, yaitu dari 7,47 tahun pada tahun 2008 menjadi 7,78 tahun dengan indeks sebesar 51,8 persen di tahun 2009. Angka ini menggambarkan bahwa dengan rata-rata bersekolah antara 7 sampai 8 tahun, berarti sumber daya manusia di Kabupaten Lebong masih tergolong rendah.

Indeks Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 51,8 persen pada tahun 2009 menunjukkan bahwa secara umum penduduk Kabupaten Lebong yang berpendidikan formal sebesar 51,8 persen dari seluruh pendidikan yang harus dijalani yaitu 15 tahun. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan menggalakkan program yang mampu menumbuhkan kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan formal sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas.

Tabel 13. Indeks Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pendidikan di Kabupaten Lebong Tahun 2008-2009

Provinsi/ Kabupaten	Indeks Melek Huruf		Indeks Rata-Rata Lama Sekolah		Indeks Pendidikan	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lebong	95.19	95.20	49.81	51.88	80.06	80.76
<b>Bengkulu</b>	<b>94.87</b>	<b>94.90</b>	<b>53.33</b>	<b>54.87</b>	<b>81.03</b>	<b>81.56</b>

Indeks Pendidikan merupakan indeks gabungan antara Indeks Melek Huruf dan Indeks Rata-Rata Lama Sekolah. Indeks ini mampu menggambarkan

keberhasilan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Lebong. Besarnya Indeks Pendidikan di Kabupaten Lebong tahun 2009 mencapai 80,76, lebih tinggi dibanding tahun 2008 yang sebesar 80,06. Dari klasifikasi komponen Indeks Pendidikan, dapat dilihat bahwa Kabupaten Lebong pada tahun 2008 dan 2009 sudah berada pada kategori tinggi. Kondisi ini sama dengan Indeks Pendidikan rata-rata penduduk Provinsi Bengkulu.

### 4.3. Indeks Daya Beli

Komponen *purchasing power parity* yang dikenal dengan komponen kemampuan daya beli atau standar hidup layak diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil perkapita yang disesuaikan (*UNDP menggunakan indikator PDB perkapita riil yang telah disesuaikan (adjusted real GDP per capita) karena tidak tersedia indikator lain yang lebih baik untuk keperluan perbandingan antar negara*). Besaran nilai Indeks Daya Beli menunjukkan tingkat kemampuan daya beli penduduk di suatu daerah. Semakin besar nilai Indeks Daya Beli mengindikasikan tingkat kesejahteraan penduduk yang semakin baik.

Tabel 14. Indikator dan Indeks Daya Beli Kabupaten Lebong  
Tahun 2008-2009

Provinsi/ Kabupaten	Indikator Daya Beli (Rp,000)		Indeks Daya Beli	
	2008	2009	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lebong	615.56	616.86	59.06	59.37
<b>Bengkulu</b>	<b>625.66</b>	<b>626.82</b>	<b>61.39</b>	<b>61.66</b>

Daya beli penduduk Kabupaten Lebong yang dicerminkan oleh besaran pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan sebesar 615.560 rupiah pada tahun 2008 meningkat menjadi 616.860 rupiah di tahun 2009. Besaran tersebut menunjukkan adanya kecenderungan meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat di Kabupaten Lebong. Bila dibandingkan rata-rata penduduk Provinsi Bengkulu, baik tahun 2008 maupun 2009, kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Lebong masih berada di bawah rata-rata provinsi. Selain itu, pencapaian Indeks Daya Beli juga mempunyai pola yang sama dengan indikator konsumsi riil perkapita dengan perubahan indeks dari 59,06 persen menjadi 59,37 persen. Jika dilihat klasifikasi komponen Indeks Daya Beli, maka Kabupaten Lebong pada tahun 2008 dan 2009 berada pada kategori tinggi, sama halnya dengan rata-rata Provinsi Bengkulu.

#### **4.4. Indeks Pembangunan Manusia**

Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu daerah memperlihatkan jarak yang harus ditempuh (*shortfall*) untuk mencapai nilai maksimum, yaitu 100 (angka IPM berkisar antara 0-100). Bagi suatu wilayah, angka IPM menggambarkan kemajuan pembangunan manusia di suatu daerah dan merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam rangka mencapai kondisi yang ideal.

Hasil penghitungan angka IPM Kabupaten Lebong ternyata belum termasuk dalam kategori kesejahteraan tinggi menurut skala internasional. IPM Kabupaten Lebong tahun 2008 sebesar 69,08 termasuk dalam tingkat

pembangunan manusia kesejahteraan menengah tinggi. Angka ini meningkat pada tahun 2009 menjadi 69,63 dan masih tetap termasuk kategori yang sama dengan tahun sebelumnya. Berbeda dengan rata-rata penduduk Provinsi Bengkulu yang dalam dua tahun terakhir termasuk dalam tingkat pembangunan manusia yang tinggi. Hal ini tercermin dari IPM Provinsi Bengkulu sebesar 72,14 di tahun 2008 dan meningkat menjadi 72,55 di tahun 2009.

Nilai IPM Kabupaten Lebong sangat ditentukan oleh capaian tiga dimensi dasar pembangunan manusia. Dilihat dari peningkatannya, ternyata IPM dari komponen angka harapan hidup, pendidikan, dan daya beli mengalami kenaikan. Indeks Harapan Hidup meningkat sebesar 0,64 persen, Indeks Pendidikan meningkat sebesar 0,70 persen, dan Indeks Daya Beli mengalami peningkatan sebesar 0,31 persen.

Tabel 15. Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya  
di Kabupaten Lebong Tahun 2008-2009

Provinsi/ Kabupaten	Indeks Harapan Hidup		Indeks Pendidikan		Indeks Daya Beli		IPM		Reduksi <i>Shortfall</i>
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Lebong	68.12	68.76	80.06	80.76	59.06	59.37	69.08	69.63	1.78
<b>Bengkulu</b>	<b>74.00</b>	<b>74.42</b>	<b>81.03</b>	<b>81.56</b>	<b>61.39</b>	<b>61.66</b>	<b>72.14</b>	<b>72.55</b>	<b>1.46</b>

Dibanding tahun sebelumnya, IPM Kabupaten Lebong tahun 2009 meningkat sebesar 0,55 persen. Selain itu, reduksi *shortfall* Kabupaten Lebong

tahun 2008-2009 yang sebesar 1,78 mengalami penurunan dibanding reduksi *shortfall* tahun 2007-2008 yang sebesar 2,20. Besarnya reduksi *shortfall* menggambarkan kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Lebong yang tercermin dalam tiga indikator pembangunan manusia yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Dengan kata lain, hal ini menandakan bahwa selama dua tahun terakhir Kabupaten Lebong mengalami peningkatan lebih cepat untuk menuju kondisi yang ideal.

#### **4.5. Perbandingan IPM Antar Kabupaten/Kota**

Jika dilihat dari capaian IPM antar kabupaten/kota, pada tahun 2009 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lebong berada pada peringkat keenam dari sepuluh kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu. Peringkat tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2008. Angka IPM tertinggi adalah di Kota Bengkulu yaitu sebesar 77,31, disusul oleh Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Bengkulu Utara dengan angka IPM masing-masing sebesar 71,57 dan 70,98.

Provinsi Bengkulu sendiri dengan angka IPM di tahun 2009 sebesar 72,55 termasuk ke dalam provinsi yang memiliki angka IPM tinggi dan berada pada peringkat 12 dari 33 provinsi di Indonesia. Artinya, telah terjadi penurunan peringkat IPM Provinsi Bengkulu dibandingkan tahun 2008 yang berada di peringkat 11, padahal angka IPM Provinsi Bengkulu dari tahun 2008 sampai 2009 mengalami kenaikan. Hal ini bukan dikarenakan pembangunan manusia di Provinsi

Bengkulu hingga tahun 2009 mengalami penurunan, melainkan peningkatannya (percepatan pembangunan manusia) kurang cepat dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia.

Tabel 16. Angka IPM dan Peringkat IPM Menurut Kabupaten/Kota  
di Provinsi Bengkulu Tahun 2008-2009

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			
	Tahun 2008	Peringkat*)	Tahun 2009	Peringkat*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Provinsi Bengkulu	72.14	11	72.55	12
Kab. Bengkulu Selatan	71.03	2	71.57	2
Kab. Rejang Lebong	69.88	4	70.46	4
Kab. Bengkulu Utara	70.63	3	70.98	3
Kab. Kaur	68.63	7	69.21	7
Kab. Seluma	66.11	10	66.48	10
Kab. Mukomuko	69.62	5	70.11	5
Kab. Lebong	69.08	6	69.63	6
Kab. Kepahiang	67.00	9	67.59	9
Kab. Bengkulu Tengah	67.86	8	68.18	8
Kota Bengkulu	77.01	1	77.31	1

\*) Untuk Kabupaten/Kota Peringkat Se-Provinsi Bengkulu dan Untuk Provinsi Peringkat Provinsi Se-Indonesia

PENUTUP



<http://lebongkab.bpt.go.id>

## BAB 5 PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Secara umum jika dibandingkan dengan tahun 2008, pada tahun 2009 pembangunan manusia di Kabupaten Lebong relatif lebih baik. Hal ini tercermin dari besaran angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lebong tahun 2009 sebesar 69,63 yang mengalami peningkatan sebesar 0,55 persen dibandingkan tahun 2008 yang sebesar 69,08. Kenaikan angka IPM ini seiring dengan kenaikan seluruh komponen pembentuk IPM yaitu angka harapan hidup sebesar 66,26 tahun, angka melek huruf sebesar 95,20 persen, rata-rata lama sekolah sebesar 7,78 tahun dan pengeluaran perkapita disesuaikan sebesar 616.860 rupiah.

Berdasarkan tinggi rendahnya IPM, Kabupaten Lebong berada pada peringkat ke-enam dari sepuluh kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu sendiri memiliki besaran IPM yang berada pada posisi ke-12 dari 33 provinsi di Indonesia. Selain itu, besaran IPM Kabupaten Lebong pada tahun 2009 termasuk kategori menengah tinggi, sedangkan IPM Provinsi Bengkulu termasuk kategori tinggi. Untuk itu, diharapkan agar angka IPM ini dapat menjadi indikator penting dalam mengevaluasi jalannya pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lebong.

## 5.2. Implikasi Kebijakan

Dari pemahaman hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan komponen-komponennya, dapat dirancang program peningkatan kesejahteraan penduduk melalui upaya peningkatan kesehatan dan peningkatan pendidikan penduduk secara umum. Sementara itu, upaya peningkatan daya beli penduduk dapat merupakan dampak berantai dari upaya peningkatan kesehatan dan pendidikan penduduk.

Upaya peningkatan kesehatan penduduk dapat dilakukan di antaranya melalui:

- ✓ Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai cara hidup sehat, berupa upaya pencegahan dan upaya pengobatan baik tradisional maupun moderen.
- ✓ Meningkatkan ketersediaan obat-obatan moderen yang terjangkau oleh masyarakat.
- ✓ Meningkatkan ketersediaan layanan kesehatan terutama berupa revitalisasi Posyandu dan layanan Puskesmas baik keliling maupun biasa.
- ✓ Menggalakkan program-program yang mampu menekan angka kematian bayi dan meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak.
- ✓ Memperbaiki mutu lingkungan hidup atau pemukiman sekaligus menanamkan kepada masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan pemukiman untuk mengurangi penyebaran penyakit.

Di sisi lain, upaya peningkatan pendidikan masyarakat dapat juga dilakukan antara lain dengan:

- ✓ Penajaman sasaran wajib belajar sembilan tahun melalui berbagai jalur.
- ✓ Khusus mengenai upaya pemberantasan buta huruf melalui kejar Paket A, agar dapat dijaga kemampuan peserta yang telah lulus dengan adanya kegiatan lanjutan seperti kelompok pembaca. Dengan demikian, kemampuan membaca dapat tetap terjaga di samping merupakan upaya pembekalan ilmu pengetahuan yang berkesinambungan.
- ✓ Penyediaan dan penyebaran guru berdedikasi dan berkualitas perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah karena guru merupakan tulang punggung bagi pembentukan pelajar yang berkualitas.
- ✓ Adanya peningkatan sarana dan prasarana transportasi sebagai penunjang akses masyarakat dalam menjangkau pendidikan formal.

Di bidang ekonomi, perbaikan daya beli masyarakat tidak terlepas dari peningkatan pendapatan. Secara berkesinambungan, jika terjadi peningkatan mutu kesehatan dan pendidikan, berarti juga telah terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga diharapkan terciptanya generasi-generasi yang siap bersaing di era globalisasi. Selain itu, peningkatan pendapatan juga tidak terlepas dari berkembangnya dunia usaha dan semakin baiknya iklim investasi untuk menciptakan peluang-peluang usaha. Untuk itu, hendaknya pemerintah Kabupaten Lebong mampu menjadi pemicu berkembangnya perekonomian daerah dengan menghidupkan dunia usaha pada berbagai sektor ekonomi dengan melihat potensi daerah yang dimiliki.

